

## ABSTRAK

**AAN DWI ARZYANA, NIM 708532001. Pengaruh Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial ( Studi Empiris di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Skripsi, Jurusan Akuntansi Kekhususan Akuntansi Pemerintahan. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, 2012.**

Kinerja dalam organisasi sektor publik merupakan sebuah prestasi yang dicapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Sebuah organisasi sektor publik senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud tanpa adanya manajemen yang baik, yang mendorong upaya-upaya institusi untuk meningkatkan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial ( Studi Empiris di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan populasi sebanyak 29 SKPD. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner kepada setiap responden. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang disebarikan kepada 41 responden dengan 9 pertanyaan yang valid untuk variabel Kinerja Manajerial, 10 pertanyaan untuk variabel Keadilan Prosedural, dan 5 pertanyaan untuk variabel Sistem Pengukuran Kinerja. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 16.

Hasil analisa data dengan menggunakan persamaan regresi  $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$  kemudian diperoleh hasil  $Y = 2.343 + 0.426x_1 + 0.768x_2 + e$ . Bentuk regresi linier berganda tersebut menjelaskan, konstanta sebesar 2.343 menyatakan bahwa jika Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja tidak ada maka Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan nilainya adalah sebesar 2.343. Sedangkan koefisien regresi (nilai  $b_1$  dan  $b_2$ ),  $b_1$  sebesar 0.426 artinya bahwa setiap terjadi pelaksanaan Keadilan Prosedural maka Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan sebesar 0.426 dan  $b_2$  sebesar 0.768 artinya bahwa setiap terjadi pelaksanaan Sistem Pengukuran Kinerja maka Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan sebesar 0.768. Nilai R Square 0,409 artinya Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja memberikan kontribusi sebesar 40,9% terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Uji F menunjukkan nilai probabilitas sig. sebesar  $0.000 < 0.05$ , dengan demikian hipotesis penelitian diterima.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan signifikan yang diberikan oleh Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

***Kata Kunci : Keadilan Prosedural, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Kinerja Manajerial.***

## ABSTRACT

**AAN DWI ARZYANA, NIM 708532001. The Influence of Procedural Justice and Performance Measurement System to the Managerial Performance (Empirical Studies in Labuhanbatu Selatan County Government). Thesis, Major of Government Accounting, Accounting Department. Faculty of Economic, State University of Medan, 2012.**

Performance in public sector organizations is an achievement in providing services to the community in a period. A public sector organizations are required to continuously improve its performance. Improved performance can not be realized without good management, which encourages efforts to increase institutional performance. This study aims to determine whether The Influence of Procedural Justice and Performance Measurement System to the Managerial Performance (Empirical Studies in Labuhanbatu Selatan County Government).

The research was conducted at (SKPD) Labuhanbatu Selatan District with a population of 29 SKPD. The sampling technique used was purposive sampling method, in order to obtain a sample of 41 respondents. Data collection technique used was to deliver questionnaires to each respondent. Based on validity and reliability of a questionnaire distributed to 41 respondents to 9 question is valid for the variable Managerial Performance, 10 questions for Procedural Justice variables, and five questions for the Performance Measurement System variables. Methods of data analysis used in this study is multiple regression analysis with SPSS 16.

The results of data analysis using the regression equation  $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$  then obtain the result  $Y = 2.343 + 0.426x_1 + 0.768x_2 + e$ . Form of multiple linear regression was explained, the constant of 2.343 states that if the Procedural Justice and Performance Measurement System is not listed, Managerial Performance in Labuhanbatu Selatan SKPD District values are for 2.343. While the regression coefficient ( $b_1$  dan  $b_2$  values),  $b_1$  of 0.426 means that every place the implementation of the Justice Procedural of Managerial Performance Labuhanbatu Selatan SKPD District increased by 0.426, and  $b_2$  for 0.768 means that every place the implementation of the Performance Measurement System of Managerial Performance Labuhanbatu Selatan SKPD District increased by 0.768. R Square value of 0.409 means Procedural Justice and Performance Measurement System accounts for 40.9% of Managerial Performance Labuhanbatu Selatan SKPD District. F test indicates the probability of sig. for  $0.000 < 0.05$ , thus the research hypothesis is accepted.

The conclusions of this study is that there are significant and positive impact provided by the Procedural Justice and Performance Measurement System on Managerial Performance in Labuhanbatu Selatan SKPD District.

**Keywords: Procedural Justice, Performance Measurement Systems and Managerial Performance**